

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif kasus dengan pendekatan analisis statistik deskriptif. Menurut Sekaran, 2009 yang dikutip oleh Latifa (2018) tujuan studi deskriptif adalah untuk memberikan gambaran mengenai unsur-unsur yang relevan dengan fenomena perhatian dari pandangan seseorang, organisasi, orientasi-industri atau lainnya. Tujuan tersebut sesuai dengan penelitian ini yaitu mengetahui kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Malang. Penelitian ini digunakan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan data numerik, mulai dari pengumpulan dan pengolahan data, yang selanjutnya menafsirkan data yang diteliti dan memberikan kesimpulan sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku.

### **3.2 Objek dan Sumber Data Penelitian**

Objek penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Malang Jawa Timur yang berkantor pusat di Kecamatan Kepanjen dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan tipe data non fisik. Data ini berupa dokumen anggaran dan realisasi kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Malang dan tercantum pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2020-2022 yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Operasional;
- c. Neraca;
- d. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sumber data penelitian diperoleh melalui laman Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang (<https://bkad.malangkab.go.id/pd/index>), laman Pemerintah Kabupaten Malang (<https://portal.malangkab.go.id/mlg/default/anggaran>), dan laman Kabupaten Malang Dalam Angka dari BPS Kabupaten Malang (<https://malangkab.bps.go.id/id/publication>).

### **3.3. Variabel, Operasionalisasi, dan Pengukuran**

Untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan analisis rasio keuangan, penting untuk mengidentifikasi variabel yang relevan, mengoperasionalkan variabel tersebut agar dapat diukur dan akhirnya mengukur rasio-rasio yang sesuai dengan tujuan analisis tersebut. Variabel utama yang digunakan dalam analisis rasio keuangan pemerintah daerah pada penelitian ini terdiri dari pendapatan daerah dan belanja daerah. Pendapatan daerah adalah sumber-sumber pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah, baik berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapat Daerah yang Sah. Sementara itu belanja daerah adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan pelayanan publik.

Operasionalisasi adalah langkah untuk mendefinisikan variabel-variabel di atas secara lebih konkret sehingga dapat diukur. Pendapatan daerah dioperasionalkan sebagai total penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah dalam periode anggaran, termasuk PAD (pajak dan retribusi daerah), Pendapatan Transfer (transfer pemerintah pusat dan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi), serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Belanja daerah dioperasionalkan sebagai total pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran untuk membiayai berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan administrasi.

Setelah dilakukan operasionalisasi variabel-variabel tersebut, langkah berikutnya adalah melakukan pengukuran rasio-rasio keuangan yang

menggambarkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Beberapa rasio yang sering digunakan dalam analisis kinerja keuangan daerah antara lain:

### 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah salah satu alat untuk mengukur sejauh mana suatu daerah dapat membiayai pengeluaran atau belanja daerahnya tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dihitung menggunakan persamaan berikut ini (Mahmudi, 2019):

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

Berdasarkan persamaan di atas dapat dinyatakan jika Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tinggi, maka daerah tersebut memiliki tingkat kemandirian yang baik dan mampu membiayai belanja daerah melalui sumber daya internalnya (PAD). Sementara Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang rendah mengindikasikan ketergantungan yang besar pada dana transfer dari pemerintah pusat.

### 2. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas memberikan informasi tentang seberapa efektif pemerintah daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah seperti pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lainnya. Realisasi pendapatan merupakan jumlah pendapatan yang berhasil dikumpulkan oleh pemerintah daerah dalam periode anggaran tertentu. Sementara itu, target pendapatan adalah jumlah pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBD atau rencana pendapatan daerah pada awal periode anggaran. Rasio Efektivitas dapat dihitung menggunakan rumus berikut ini:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Target Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

Berdasarkan rumus di atas dapat dinyatakan bahwa semakin besar realisasi pendapatan terhadap target pendapatan, maka Rasio Efektivitas akan semakin besar yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan. Apabila rasio yang diperoleh kecil maka menunjukkan pemerintah daerah belum berhasil mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan dan perlu untuk mengidentifikasi sumber pendapatan daerah yang belum digali dengan maksimal.

### 3. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi mengukur seberapa baik pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran untuk kegiatan yang menghasilkan output yang diinginkan. Rasio Efisiensi juga dapat digunakan untuk mengukur penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah dan disebut Rasio Efisiensi Belanja Daerah. Dengan kata lain, rasio ini menunjukkan seberapa besar anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dibandingkan dengan anggaran yang direncanakan. Rasio Efisiensi ini terdiri atas:

#### a) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Efisiensi dalam konteks ini berarti membandingkan antara pengeluaran yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Semakin kecil Rasio Efisiensi ini maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya (Ambya, 2023). Penghitungan Rasio Efisiensi yaitu:

$$\text{Rasio Efisiensi Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

Rasio efisiensi adalah indikator yang menunjukkan seberapa baik pemerintah daerah menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan finansialnya (Halim dan Kusufi, 2014). Efisiensi keuangan mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pengeluaran dan pendapatan dengan optimal (Mahmudi, 2019).

#### b) Rasio Efisiensi Belanja Daerah

Rasio Efisiensi dapat digunakan untuk mengukur penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah dan disebut Rasio Efisiensi Belanja Daerah. Dengan kata lain, rasio ini menunjukkan seberapa besar anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dibandingkan dengan anggaran yang direncanakan. Rasio ini merupakan hasil perbandingan antara realisasi Belanja Daerah dengan anggaran Belanja Daerah (Kawatu, 2019 dalam Sholikhah dan Priyono 2022). Rasio yang lebih rendah menggambarkan efisiensi yang lebih baik, karena pemerintah daerah berhasil menggunakan anggaran lebih rendah dari yang telah direncanakan. Apabila hasil dari perhitungannya menunjukkan lebih dari 100%, maka pemerintah daerah dianggap terjadi pemborosan anggaran. Penghitungan Rasio Efisiensi yaitu:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja Daerah} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100 \%$$

Rasio Efisiensi Belanja Daerah ini sangat penting dalam menilai pengelolaan anggaran daerah karena membantu pemerintah daerah memastikan bahwa pengeluaran tidak melebihi batas yang telah ditetapkan dan mengidentifikasi apakah ada potensi penghematan, membantu menunjukkan seberapa efektif dan transparan pengelolaan keuangan daerah, yang akan memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat, serta dengan efisien belanja yang lebih tinggi, pemerintah daerah dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk sektor-sektor prioritas atau kebutuhan masyarakat lainnya, sehingga meningkatkan kinerja fiskal secara keseluruhan.

#### 4. Rasio Aktivitas

Rasio Aktivitas adalah salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur sejauh mana penggunaan belanja daerah sesuai dengan potensi pendapatan daerah yang tersedia. Rasio ini memberikan gambaran tentang

efisiensi dalam pengelolaan belanja daerah dan seberapa baik pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya untuk kegiatan yang sesuai dengan kemampuan pendapatan yang dimiliki. Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja, yang penting untuk kestabilan fiskal. Rasio Aktivitas ini terdiri atas:

**a) Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Daerah**

Rasio belanja operasi adalah rasio keuangan daerah yang merupakan hasil perbandingan antara total belanja operasi yang dilakukan pemerintah daerah terhadap total belanja daerah yang diterima. Artinya, rasio ini menggambarkan seberapa besar belanja operasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun periode anggaran. Rasio ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut (Halim, 2007 dalam Ambya, 2023):

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100 \%$$

Semakin besar rasio belanja operasi terhadap total belanja daerah, maka pemerintah daerah tergolong aktif melakukan belanja operasi dalam satu tahun periode anggaran atau sebaliknya. Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal.

**b) Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah**

Rasio belanja modal adalah rasio keuangan daerah yang menggambarkan belanja untuk pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah dengan menggunakan dana yang ada. Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut (Halim, 2007 dalam Ambya, 2023):

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100 \%$$

Berdasarkan persamaan di atas dapat dinyatakan bahwa semakin besar rasio belanja modal terhadap total belanja daerah, maka pemerintah daerah tergolong aktif melakukan belanja modal dalam satu periode anggaran atau sebaliknya. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah sangat fokus pada pembangunan dan investasi. Rasio yang tinggi mencerminkan bahwa sebagian besar anggaran dialokasikan untuk kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas daerah dalam jangka panjang. Jika rasio ini rendah artinya pemerintah daerah lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk pengeluaran operasi daripada untuk pembangunan yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum mengutamakan pembangunan jangka panjang atau bahwa belanja operasi lebih banyak digunakan untuk operasional yang tidak langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah metode dokumentasi dengan cara mencatat atau mengcopy dokumen-dokumen, arsip-arsip maupun data lain yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dokumen yang diperlukan yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2020-2022.

### **3.5 Prosedur Analisis**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis kuantitatif kasus deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan karakteristik dari suatu populasi atau fenomena berdasarkan data yang dikumpulkan, analisis ini tidak dimaksudkan untuk membuat prediksi atau

menguji hipotesis, melainkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang variabel yang diteliti. Penelitian ini mencoba untuk mengukur dan menjelaskan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Malang selama 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.

Prosedur analisis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan permasalahan yang ada, peneliti akan menganalisis untuk menentukan tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2020-2022. Langkah-langkah analisis yang dilakukan adalah:

- a. Mengumpulkan ringkasan data Pendapatan Asli Daerah dan data Total Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020-2022.
- b. Melakukan perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dengan menggunakan persamaan berikut ini:

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

- c. Menganalisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dengan kriteria pada tabel berikut ini dan menarik kesimpulan.

Tabel 4. Pola Hubungan Kemandirian Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan	Keterangan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif	Dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah

<b>Kemampuan Keuangan</b>	<b>Rasio Kemandirian (%)</b>	<b>Pola Hubungan</b>	<b>Keterangan</b>
Rendah	25-50	Konsultatif	Dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang serta lebih banyak memberikan konsultasi
Sedang	50-75	Patisipatif	Dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan ekonomi daerah
Tinggi	75-100	Delegatif	Dimana campur tangan pemerintah sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah

Sumber: Halim, 2004

## 2. Analisis Rasio Efektivitas

Berdasarkan permasalahan yang ada, peneliti akan menganalisis untuk menentukan tingkat efektivitas keuangan daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2020-2022. Langkah-langkah analisis yang dilakukan adalah:

- a. Mengumpulkan data penelitian yaitu data Realisasi Pendapatan Daerah dan Target Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020-2022.
- b. Melakukan perhitungan Rasio Efektivitas dengan menggunakan persamaan berikut ini:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Target Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

- c. Menganalisis Rasio Efektivitas dengan kriteria pada tabel berikut ini dan menarik kesimpulan.

Tabel 5. Nilai Efektivitas dan Kriteria Efektivitas

<b>Presentase Efektivitas (%)</b>	<b>Kriteria Efektivitas</b>
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif
75%-89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi, 2019

### 3. Analisis Rasio Efisiensi

Berdasarkan permasalahan yang ada, peneliti akan menganalisis untuk menentukan tingkat efisiensi keuangan daerah dan belanja daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2020-2022. Langkah-langkah analisis yang dilakukan adalah:

- a. Mengumpulkan data penelitian yaitu data Realisasi Belanja Daerah dan Realisasi Pendapatan Daerah serta Anggaran Belanja Daerah yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020-2022.
- b. Melakukan perhitungan Rasio Efisiensi dengan menggunakan persamaan berikut ini:

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah:

$$\text{Rasio Efisiensi Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

Rasio Efisiensi Belanja Daerah:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja Daerah} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100 \%$$

- c. Menganalisis Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dengan kriteria pada tabel berikut ini dan Rasio Efisiensi Belanja Daerah dan menarik kesimpulan.

Tabel 6. Nilai dan Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah

Presentase Efisiensi (%)	Kriteria
>100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80%-89%	Cukup Efisien
60% - 79%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber: Halim, (2013:234)

#### 4. Analisis Rasio Aktivitas

Berdasarkan permasalahan yang ada, peneliti akan menganalisis untuk menentukan tingkat aktivitas keuangan daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2020-2022. Langkah-langkah analisis yang dilakukan adalah:

- Mengumpulkan data penelitian yaitu data Total Belanja Operasi dan Total Belanja Modal serta Total Belanja Daerah dari Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020-2022.
- Melakukan perhitungan Rasio Aktivitas dengan menggunakan persamaan berikut ini:

Rasio Belanja Operasi:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100 \%$$

Rasio Belanja Modal:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100 \%$$

c. Menganalisis Rasio Aktivitas dan menarik kesimpulan.

Dari langkah-langkah analisis di atas, maka dapat ditentukan tingkat kemandirian keuangan daerah, tingkat efektivitas, tingkat efisiensi, dan tingkat aktivitas belanja daerah Tahun Anggaran 2020-2022 pada Pemerintah Kabupaten Malang.